

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dari Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis pada Dinas Perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Bidang Perhubungan;
- f. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang Perhubungan;
- i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. PERAN STRATEGIS

Peran Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Menata Transportasi dalam rangka memperlancar Pembangunan Daerah
2. Menjadikan Transportasi sebagai penunjang, pendorong dan penggerak roda Perekonomian
3. Menjadikan Transportasi memperkuat rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan sebagai berikut :

- Kepala Dinas : RIZALDI, SH
- Sekretaris : LANDONG, SE
- Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : ANDIKA SAPUTRA, SE, MM
- Kabid Perhubungan Laut dan Udara : EMSUHRI, SH
- Kabid Keselamatan Transportasi Darat : MANUEL SEMBIRING SH
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : -
- Kasubag Program dan Keuangan : GUSDIANA CHANDRA S.SOS.MM
- Kasi angkutan : KHAIRUL B, SH
- Kasi sarana dan prasarana lalu lintas : ARMI NINGDEL, S.PD, MM
- Kasi pengelolaan dan penataan parkir : ABDUL GHAFUR.S.Pdi
- Kasi pelabuhan : IMTER PEDRIS.Pdi.M.Si
- Kasi keudaraan : KHAIRIL, SH
- Kasi angkutan laut dan keselamatan pelayaran : YONI SYAH PUTRA SH
- Kasi teknik keselamatan : SURYA BALINDA, S.Pd
- Kasi bimbingan keselamatan : HERI SETIAWAN, A.Md
- Kasi pengendalian operasional dan penertiban : AHLAN NASIR SE
- Kepala UPT Bandara : EVA WARDI PUTRA, SH
- Kepala UPT Terminal : MISNAN, SH
- Kepala UPT PKB : ADE PUTRA, SE
- KTU UPT PKB : -
- KTU Bandara : ARI SURYA PUTRA A.Md
- KTU Terminal : -
- Pengurus Barang : ASWANDI, A.Md
- Pengurus Barang : NASTIAN, SE
- Bendaahara Penerima : YUDI CHANDRA
- Staf : BAGUS ANANDA ARIYADI
- Staf : RONI SURYANTO
- Bendahara Pengeluaran : SANARA MUDA, A.MdLLASDP

- Staf : DANI NASRUL HADY PRANATA, A.Md.LLAJ
- Staf : M. SHOLEH, A.Md
- Staf : RAHMI LIDYA, A.Ma PKB
- Staf : DESI OKTAVIANDI, A.Ma PKB
- Staf : YOGI FEBRIANDI, A.Md PKB

D. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 01 Januari 2020 adalah sebanyak 156 (Seratus lima puluh enam orang) orang dengan tingkatan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)
IV	7
III	15
II	8
I	-
PTT/ Honor daerah	12
THL	114
Jumlah	158

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)
S3	-
S2	4
S1	34
DIII	13
DII	5
DI	-
SLTA	94
SLTP	3
SD	3
Jumlah	156

E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dimaksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan.

Program yang terdiri atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020, yang di tujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu di harapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan.

Selanjutnya dilakukan system pengukuran Laporan Kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencana, yaitu capaian kinerja tahun 2020 di bandingkan dengan rencana kinerja tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan atau kelemahan pada masa yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 Tahun yaitu 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

PERNYATAAN VISI

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan instansi pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

***“Terwujudnya Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat,
bermatabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan”.***

PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus di emban dan di laksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan maka dibuatlah misi untuk mencapai visi tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mendukung tercapainya Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Misi 2, Misi 5 dan Misi 6 Yaitu :

- **Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (Population responsive dan gender responsive).**
- **Misi 5 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.**

- **Misi 6 yaitu Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat di capai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Menjadikan Kabupaten Pasaman Barat yang berkembang tertib melalui transportasi yang aman, nyaman dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa transportasi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tujuan I	Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional
Sasaran	1. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang terampil dan disiplin 2. Terwujudnya masyarakat sadar akan keselamatan lalu lintas darat, laut dan udara
Tujuan II	Mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas
Sasaran	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mengupaya pencapaian visi dan misi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan analisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran pencapaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. Paparan Kinerja Kegiatan.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan output (keluaran) sebagai berikut :

Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan

B. Paparan Kinerja Sasaran.

Dengan terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2020 telah mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Angka kecelakaan lalu lintas 1,6 (ratio/10.000 penduduk)
 - Pembinaan dan penertiban transportasi laut 12 bulan
 - Operasional kendaraan angkut sekolah 12 bulan
 - Pengawasan Pejabat Pemerintah 12 bulan
 - Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 12 bulan
 - Perawatan Rambu Lalu Lintas dan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas 12 bulan
 - Perawatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
2. Proporsi penduduk yang mendapatkan akses transportasi publik yang nyaman dan inklusif
 - Pelaksanaan operasional bandara 12 bulan
3. Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - Pelaksanaan pengadaan marka di bundaran simpang empat dan simpang pasaman baru 1 paket.
 - Pelaksanaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Luhak Nan Duo 1 Paket.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi.

1. Program peningkatan pelayanan angkutan.

1. Evaluasi.

a. Masukan (Input)

Dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pada program ini yang mana nanti akan menghasilkan keluaran (output) misalnya SDM, dana, waktu, material, teknologi dll.

b. Keluaran (Output)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini telah dilaksanakan dengan menghasilkan output (keluaran) yaitu terlaksananya layanan angkutan darat, laut dan udara bagi masyarakat serta pembinaan / penertiban transportasi perhubungan

c. Hasil (Outcome)

Setelah terlaksananya kegiatan-kegiatan pada program ini maka, telah menghasilkan Outcome, yaitu meningkatnya kualitas layanan angkutan darat, laut dan udara dengan masih adanya pelayanan transportasi darat, laut dan udara

d. Manfaat (Benefit)

Dengan adanya layanan transportasi darat, laut dan udara masyarakat pasaman barat terpenuhi kebutuhan akan moda transportasi.

e. Dampak (Impact)

Dengan adanya layanan transportasi darat, laut dan udara yang di gunakan oleh masyarakat akan memperlancar aktivitas dan laju perekonomian masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaian.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan masih terdapat kendala :

- Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;

- Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
- Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan
- Belum Maksimalnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Dikarenakan ada pandemi global COVID-19;

3. Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Kegiatan dalam rangka pembinaan dan **peningkatan pelayanan angkutan** ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan angkutan

- Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
- Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
- Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

1. Evaluasi.

a. Masukan (Input)

Dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pada program ini yang mana nanti akan menghasilkan keluaran (Output) misalnya SDM, dana, waktu, material, teknologi dll.

b. Keluaran (Output)

Pelaksanaan kegiatan pada program ini telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pejabat pemerintah, Penertiban dan pengaturan lalulintas dan pasar tumpah serta pengadaan fasilitas keselamatan jalan

c. Hasil (Outcome)

Setelah terlaksananya kegiatan Pengawasan terhadap pejabat pemerintah, Penertiban dan pengaturan lalu lintas dan pasar tumpah serta pengadaan fasilitas keselamatan jalan pada program ini maka, telah menghasilkan Outcome, yaitu Terjaganya keselamatan pejabat dan rombongan dalam perjalanan, lancarnya arus lalu lintas di pasar tumpah 8 titik (pasar) serta tersedianya fasilitas keselamatan jalan raya

d. Manfaat (Benefit)

Dengan adanya kegiatan Pengawasan terhadap pejabat pemerintah, Penertiban dan pengaturan lalu lintas dan pasar tumpah serta pengadaan fasilitas keselamatan jalan ini maka lalu lintas lancar dan aman.

e. Dampak (Impact)

Dengan adanya Dinas Perhubungan akan membuat lalu lintas perhubungan di Pasaman Barat berjalan dengan lancar dan nyaman

2. Hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaian.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan masih terdapat kendala :

- Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
- Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
- Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- Belum Maksimal Program dan Kegiatan Dikarenakan ada pandemi global COVID-19

3. Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Kegiatan dalam rangka pembinaan dan **peningkatan pelayanan angkutan** ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan angkutan

- Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
- Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);

- Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

D. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran.

Dalam pencapaian sasaran kinerja dalam kegiatan tahun 2020 sudah bisa mencapai 92,96%.

E. Akuntabilitas Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2020.

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2020, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 mempunyai target sebesar Rp. 936.674.250,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sampai 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 238.629.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus

Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah) atau 25,48 % dari target. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 287.077.453.- pendapatan tahun ini turun sebesar Rp. 48.448.453,- .

Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

URAIAN	TAHUN 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	5.065.000	1.600.000	31,59
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	799.960.000	221.723.000	27,72
Retribusi Kekayaan Daerah	111.649.250	3.000.000	2,69
Retribusi Terminal	10.000.000	8.506.000	85,06
Retribusi Khusus Tempat Parkir	10.000.000	3.800.000	38,00
JUMLAH	936.674.250	238.629.000	25,48

1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Dasar Pemungutan Retribusi adalah Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribususi Parkir di tepi jalan umum menggunakan Karcis Seri A,B,C,D dan E. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	SERI	Nilai	Diminta		Dipakai		Sisa	
			LBR	NILAI	LBR	NILAI	LBR	NILAI
1	B	4.000	1.000	4.000.000	-	-	1.000	4.000.000
2	C	4.000	1.000	4.000.000	200	800.000	800	3.200.000
3	D	4.000	1.000	4.000.000		-	1.000	4.000.000
4	E	6.000	300	1.800.000	100	600.000	200	1.200.000
5	E	6.000	700	4.200.000	-	-	700	4.200.000
JUMLAH			4.000	18.000.000	300	1.400.000	3.700	16.600.000

Sisa Karcis sebanyak 2.000 lembar atau senilai Rp. 7.600.00,-, telah dikembalikan ke Badan Asset dan Pendapatan Daerah kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan metode dengan Surat Ketetapan Retribususi Daerah (SKRD)

Retribusi pengujian kendaraan Bermotor dipungut kepada kendaraan wajib uji sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Pasaman Barat 85 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan perubahan

tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uji Berkala Pertama dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian.

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jenis kendaraan wajib uji dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis penerimaan retribusi	Tarif
A	Biaya administrasi atau formulir	Rp 10.000
B	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan bermotor / Upah Uji	
	1. Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan Khusus	Rp 35.000
	2. Mobil penumpang umum, Kereta Tempelan/ kereta gandeng	Rp 25.000
C	Biaya Pemasangan Tanda samping	
	1. Stiker ukuran Kecil (untuk kendaraan roda empat kebawah)	Rp 12.000
	2. Stiker mobil penumpang umum, Kereta tempelan / kereta gandengan (untuk kendaraan roda enam kebawah)	Rp 15.000
	3. Biaya Pengecatan Tanda Samping	Rp 15.000
D	Biaya Kawat dan segel	Rp 15.000
E	Biaya buku uji	Rp 10.000

Untuk pencetakkan Surat Ketetapan retribusi daerah (SKRD) di cetak oleh Badan Asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 60 blok dimana 1 blok terdiri dari 50 rangkap SKRD.

Rincian penggunaan Surat Ketetapan retribusi daerah (SKRD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Diminta	Dipakai	Dikembalikan
300 Lembar	136 Lembar	164 Lembar
SKRD lanjutan		
2.600 Lembar	2.378 Lembar	222 Lembar

Terdapat 122 Lembar SKRD yang Dikembalikan.

3. Retribusi Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah pemungutan menggunakan metode pemungutan dengan Surat ketetapan Retribusi daerah.

Retribusi kekayaan daerah dipungut kepada masyarakat yang menyewa bus ke Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati

nomor 126 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan rincian retribusi sebagai berikut :

No	Jenis	Mer k / type	Kapasit as	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Keterangan
1	Mikrobus	Isuzu	21 Org	600.000. ditambah biaya BBM dan Uang Harian Operator	Biaya BBM dan Uang Harian Operator mengacu kepada Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat
2	Bus	Isuzu	31 Org	750.000. ditambah biaya BBM dan Uang Harian Operator	Biaya BBM dan Uang Harian Operator mengacu kepada Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Peeraturan Bupati Pasaman Barat

4. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal menggunakan metode pemungutan dengan Karcis. Retribusi terminal dipungut di Terminal Simpang Empat kepada kendaraan Angkutan umum yang menggunakan jasa Terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Retribusi terminal dipungut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Karcis yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi terminal menggunakan karcis seri H dan G. Dimana realisasi karcis dapat kami jelaskan sebagai berikut :

NO	SERI	NILAI	DIPAKAI		DISETOR		SISA	
			LBR	NILAI	LBR	NILAI	LBR	NILAI
1	H	3.000	1.500	4.500.000	1.300	3.900.000	200	600.000
2	G	4.000	100	400.000	100	400.000	-	-
JUMLAH		7.000	1.600	4.900.000	1.400	4.300.000	200	600.000

Sisa Karcis Seri H sebanyak 968 lembar atau senilai Rp. 2.904.000,- dan Sisa Karcis Seri G sebanyak 930 lembar atau senilai 3.720.000,-, telah dikembalikan ke Badan Asset dan Pendapatan Daerah kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020.

Karcis yang dipakai sebanyak 4.102 lembar namun yang baru disetor 2.070 lembar dapat kami jelaskan sebagai berikut :

NO	SERI	NILAI	DIPAKAI		DISETOR		SISA	
			LBR	NILAI	LBR	NILAI	LBR	NILAI
1	H	3.000	1.500	4.500.000	1.300	3.900.000	200	600.000
2	G	4.000	100	400.000	100	400.000	-	-
JUMLAH		7.000	1.600	4.900.000	1.400	4.300.000	200	600.000

Dari tabel diatas terdapat 2.102 Lembar Karcis yang belum disetor dikarenakan keterlambatan Petugas Pemungut Retribusi dalam melakukan penyetoran kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sehingga menjadi Piutang Pendapatan pada tahun 2020.

5. Retribusi Khusus Tempat Parkir

Retribusi Khusus Tempat Parkir menggunakan metode pemungutan dengan Karcis. Retribusi Khusus Tempat Parkir dipungut Pada pasar – pasar Nagari yang ada di kabupaten Pasaman Barat. Retribusi Khusus Tempat Parkir dipungut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Karcis yang dipergunakan dalam pemungutan Retribusi Khusus Tempat Parkir menggunakan karcis seri H, I dan J. Dimana realisasi karcis dapat kami jelaskan sebagai berikut :

NO	SERI	NILAI	DIMINTA		DIPAKAI		SISA	
			LBR	NILAI	LBR	NILAI	LBR	NILAI
1	H	2.000	1.000	2.000.000	400	800.000	600	1.200.000
2	I	5.000	1.000	5.000.000	600	3.000.000	400	2.000.000
3	J	6.000	1.000	6.000.000	200	1.200.000	800	4.800.000
JUMLAH			3.000	13.000.000	1.200	5.000.000	1.800	8.000.000

Sisa Karcis sebanyak 1.800 lembar telah di kembalikan ke Badan Asset dan Pendapatan Daerah per 31 desember 2020

Karcis yang dipakai sebanyak 1.200 lembar namun yang baru disetor 1.000 lembar dapat kami jelaskan sebagai berikut :

NO	SERI	NILAI	DIPAKAI		DISETOR		SISA	
			LBR	NILAI	LBR	NILAI	LBR	NILAI
1	H	2.000	400	800.000	400	800.000	-	-
2	I	5.000	600	3.000.000	400	2.000.000	200	1.000.000
3	J	6.000	200	1.200.000	200	1.200.000	-	-
JUMLAH		13.000	1.200	5.000.000	1.000	4.000.000	200	1.000.000

Dari tabel diatas terdapat 200 Lembar Karcis yang belum disetor dikarenakan keterlambatan Petugas Pemungut Retribusi dalam melakukan penyetoran kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sehingga menjadi Piutang Pendapatan pada tahun 2020.

Hambatan dan Peluang dalam mencapai Target Pendapatan

Adapun faktor-faktor kendala dan pendukung pencapaian target antara lain sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (27,64 %), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (27,72 %), Retribusi kekayaan Daerah (2,69%), Retribusi Terminal (85,06%) dan Retribusi Khusus Tempat Parkir (40,00%). Adapun faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:

1. Faktor kendala dan hambatan pencapaian target Retribusi Parkir di tepi jalan umum
 - Kurangnya koordinasi tentang Parkir kepada masyarakat pengelola Parkir.
 - Belum adanya peraturan tentang Parkir Dipasaman Barat.
 - Budaya Masyarakat yang masih melekat bahwasanya parker ditanah mereka maka uang parker untuk mereka pemilik tanah, sehingga kurangnya sumbangsih masyarakat untuk Pemerintah Daerah.
 - Lokasi yang menjadi objek retribusi adalah parkir di sekitar pasar – pasar nagari yang ada di seluruh Pasaman barat. Dimana lokasi parkir di pasar nagari telah dikelola oleh pemuda sehingga menyulitkan untuk menetapkan jumlah setoran parkir.
 - Berhubung adanya Virus COVID-19 yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah, maka berkurangnya pengunjung pasar.
2. Kendala dan hambatan pencapaian target Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - Masih adanya kendaraan yang tidak melakukan uji lanjutan kendaraannya
 - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengujian kendaraan bermotor.
 - Berhubung adanya Virus COVID-19 yang membatasi jumlah kendaraan yang masuk atau yang diuji sehingga berkurangnya kendaraan yang diuji.
3. Kendala dan Hambatan Pencapaian Target Retribusi Retribusi kekayaan Daerah.

- Berhubung adanya Virus COVID-19 yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah maka peminjam bus berkurang sehingga target tidak tercapai
4. Kendala dan Hambatan Retribusi Terminal
- Meningkatnya kepemilikan kendaraan roda dua (R2) sehingga mengurangi populasi angkutan umum yang beroperasi.
 - Jumlah kendaraan yang menjadi objek retribusi terminal pada tahun 2020 berkurang.
 - Tidak banyaknya angkutan dalam daerah yang beroperasi sehingga target retribusi tidak tercapai dimana setiap angkutan umum yang beroperasi untuk retribusi terminal wajib dipungut di dalam areal terminal.
 - Berhubung adanya Virus COVID-19 diberlakukannya PSBB maka berkurangnya aktivitas angkutan kota yang disebabkan kurangnya penumpang.
5. Kendala dan hambatan Retribusi Khusus Tempat Parkir
- Belum adanya lokasi parkir yang memadai di kabupaten Pasaman Barat.
 - Belum adanya tempat parkir di Objek wisata yang dipunyai Pemerintah Daerah.
 - Belum adanya Perda yang mengatur tempat Khusus Parkir.

b. Belanja

Dari anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 sebesar Rp 7.098.499.191,- dan yang terealisasi sampai Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.598.615.208,- atau sebesar 92,96 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar 96,43 % belanja tahun ini turun sebesar 3,47 %. Rencana dan realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 7.098.499.191,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.598.615.208,- atau sebesar 92,96 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 3.479.322.022,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.336.081.232,- atau sebesar 95,88 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	3.479.322.022,-	3.336.081.232,-	95,88
2	Belanja Pegawai Langsung	-	-	-
JUMLAH		3.479.322.022,-	3.336.081.232,-	95,88

▪ **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung dalam Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 3.469.797.022,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.327.098.232,- atau sebesar 95,89 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.632.684.000	1.596.934.699	97,81
2	Tunjangan Keluarga	167.719.500	163.844.028	97,69
3	Tunjangan Jabatan	203.470.000	198.969.900	97,79
4	Tunjangan Fungsional	3.150.000	0	0
5	Tunjangan Fungsional Umum	33.850.000	33.275.000	98,3
6	Tunjangan Beras	91.699.000	89.366.280	97,46
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.402.236	1.377.333	98,22
8	Pembulatan	22.716	22.356	98,42
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.335.799.570	1.243.308.636	93,08
	JUMLAH	3.469.797.022	3.327.098.232	95,89

Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan digunakan untuk membiayai :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020 seperti yang tertera pada tabel diatas. Dimana jumlah Pegawai Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 berjumlah 32 orang, dengan rincian pegawai sebagai berikut :
 - a. Golongan II = 8 orang
 - b. Golongan III = 16 orang
 - c. Golongan IV = 8 orang

2. Belanja Tambahan penghasilan Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020 seperti Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan tambahan penghasilan berupa uang makan dan minum harian pegawai yang besaran pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati No 91 Tahun 2017.

▪ **Belanja Langsung**

Belanja Langsung untuk belanja pegawai dalam Tahun 2020 Dinas Perhubungan direncanakan Rp. 9.525.000,- dan telah direalisasikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.983.000,- atau 94,31 % dengan rincian sebagai berikut .:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Uang Lembur PNS	3.630.000	3.610.000	99,45
2	Belanja Uang Lembur Non PNS	5.895.000	5.373.000	91,15
	JUMLAH	9.525.000	8.983.000	94,31

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 3.230.477.169,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.877.434.976,- atau sebesar 89,07 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	490.810.000	286.640.610	58,40
2	Belanja Bahan/Material	2.250.000	2.250.000	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	1.608.834.149	1.571.010.774	97,65
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.000.000	16.970.450	44,66
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.275.000	25.998.300	99,99
6	Belanja Makan dan Minum	4.000.000	2.720.000	68
7	Belanja Perjalanan Dinas	307.640.000	293.976.842	95,56
8	Belanja Pemeliharaan	363.008.020	315.308.000	86,86
9	Belanja Honorarium PNS	133.410.000	128.810.000	96,55
10	Belanja Honorarium Non PNS	160.650.000	160.650.000	100,00
11	Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	75.600.000	73.100.000	96,69
	JUMLAH	3.230.477.169	2.877.434.976	89,07

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Tahun 2020 Dinas Perhubungan tidak menganggarkannya.

d. Belanja Modal

Belanja modal dalam Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 388.700.000,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 385.099.000,- atau sebesar 99,07 %. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp 499.882.054,- Belanja Modal tahun 2020 turun sebesar Rp 144.783.054,- atau sebesar 29,81 %,. Rincian Belanja Modal Tahun 2020 terdiri atas :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dalam Tahun 2020 sebesar Rp 288.700.000,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 285.226.000,- atau sebesar 98,80 % .

Bila dibandingkan dengan realisasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp 69.980.000,- realisasi Tahun 2020 naik sebesar Rp 209.246.000,-.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2020 terdiri atas:

Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	2.100.000	900.000	42,86
Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor	5.000.000	4.500.000	90,00
Pengadaan Meubilei	5.000.000	5.000.000	100,00
Pengadaan Alat Pengukur Waktu	108.000.000	107.750.000	99,77
Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000	8.998.000	99,98
Pengadaan Alat Dapur	1.100.000	1.100.000	100,00
Pengadaan Personal Komputer	66.000.000	65.980.000	99,97
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	86.500.000	84.998.000	98,26
Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000	3.000.000	100,00
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000	3.000.000	100,00
JUMLAH	288.700.000	285.226.000	98,80

Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 285.226.000,-,- dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja modal pada bulan April 2020 seharga Rp 107.750.000,- merupakan Belanja modal pengadaan pengadaan Peralatan dan Mesin pengadaan Alat Pengukur Waktu (Lampu Jalan) TA 2020 (CV. Renata Putra Mandiri Teknik) dengan No. BAST : 027/01/BAST/Belanja Modal PJU/Dishub/2020 tanggal 08 April 2020.
- Belanja modal pada bulan Juni 2020 seharga Rp 3.500.000,- merupakan Belanja modal pengadaan peralatan Personal Komputer (Printer) kantor TA 2020 (CV. I.COMPUTER) berdasarkan BAST 027/01/BAST/Belanja Modal-Printer/Dishub/2020 tanggal Juni 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 10.500.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Printer) kantor TA 2020 (CV. I.COMPUTER) berdasarkan BAST 027/05/BAST/Belanja Modal-Printer/Dishub/2020 tanggal 05 Desember 2020.

- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 62.000.000,- merupakan Belanja modal pengadaan peralatan Personal Komputer (Printer Smart Card) kantor TA 2020 (PT. Multi Infra Teknologi) berdasarkan BAST 027/03/BAST/Belanja Modal-Printer-PKB/Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 23.980.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Komputerr) kantor TA 2020 (Diamond Komputer) berdasarkan BAST 027/03/BAST/Belanja Modal-Komputer-PKB/Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 5.500.000,- merupakan Belanja modal pengadaan peralatan Personal Komputer (Card Reader) kantor TA 2020 (PT. Multi Infra Teknologi) berdasarkan BAST 027/04/BAST/Belanja Modal-Card Reader-PKB/Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 4.499.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Alat Pendingin (AC) TA 2020 (CV. Global Jaya 027/02/BA-STB/Belanja Modal- AC-PKB//Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 3.498.000,- merupakan Belanja modal pengadaan peralatan personal Komputer (printer) TA. 2020 (CV. Diamond Komputer) 027/02/BA-STB/Belanja Modal- Printer PKB/Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 10.500.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Printer) kantor TA 2020 (CV. I.COMPUTER) berdasarkan BAST 027/05/BAST/Belanja Modal- Printer/Dishub/2020 tanggal 07 Desember 2020.
- Belanja Modal pada bulan Desember 2020 seharga 5.000.000,- merupakan belanja modal pengadaan Meubiler (Kursi Besi ruang Tunggu) TA.2020 (Dua Putra Furniture) berdasarkan BAST 027/01/BAST/Belanja Modal-Kursi Ruang Tunggu/Dishub/2020 Tanggal 07 Desember 2020.
- Belanja Modal pada bulan Desember 2020 seharga 4.500.000,- merupakan belanja modal pengadaan Alat Penyimpan

Perlengkapan Kantor (Lemari Besi) TA.2020 (Dua Putra Furniture) berdasarkan BAST 027/02/BAST/Belanja Modal-Lemari Besi/Dishub/2020 Tanggal 07 Desember 2020

- Belanja Modal pada bulan Desember 2020 seharga 3.000.000,- merupakan belanja modal pengadaan Kursi Kerja Pejabat TA.2020 (Dua Putra Furniture) berdasarkan BAST 027/03/BAST/Belanja Modal-Kursi Kerja/Dishub/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- Belanja Modal pada bulan Desember 2020 seharga 3.000.000,- merupakan belanja modal pengadaan meja Pejabat TA.2020 (Dua Putra Furniture) berdasarkan BAST 027/04/BAST/Belanja Modal-Meja Kerja/Dishub/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- Belanja modal pada bulan Juni 2020 seharga Rp 10.500.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer) kantor TA 2020 (CV. I.COMPUTER) berdasarkan BAST 027/05/BAST/Belanja Modal-Printer/Dishub/2020 tanggal 07 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Juni 2020 seharga Rp 42.000.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Komputer dan Laptop) kantor TA 2020 (CV. I.COMPUTER) berdasarkan BAST 027/05/BAST/Belanja Modal-Komputer/Dishub/2020 tanggal 07 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 4.499.000,- merupakan Belanja modal pengadaan Alat Pendingin (AC) TA 2020 (CV. Agung Servise) 027/02/BA-STB/Belanja Modal- AC//Dishub/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- Belanja modal pada bulan Desember 2020 seharga Rp 900.000,- merupakan Belanja modal pengadaan alat ukur/pembanding (termogun) kantor TA 2020 (Toko Sejati) berdasarkan BAST 027/05/BAST/Belanja Modal-termogun/Dishub/2020 tanggal 01 Desember 2020.

b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Belanja Bangunan dan Gedung dalam Tahun 2020 sebesar Rp 100.000.000,- dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 99.873.000,- atau sebesar 99,87 %.

Bila dibandingkan dengan Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp 133.029.000,- realisasi tahun ini turun sebesar Rp 33.156.000,- dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1.	Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000	99.873.000	99,87
JUMLAH		100.000.000	99.873.000	99,87

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 99.873.000,- dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja modal bulan Desember seharga Rp 99.873.000,- merupakan belanja modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar (Pengadaan Marka Jalan) Tahun 2020 (PT. RENATA PUTRA MANDIRI TEKNIK)) 027/01/BAST/Belanja Modal Bangunan/Dishub/2020 tanggal 14 Desember 2020.

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan dalam Tahun 2020 Dinas Perhubungan Tidak ada menganggarkannya.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Tahun 2020 Dinas Perhubungan Tidak ada menganggarkannya.

3. Surplus / Defisit

Surplus / Defisit dalam Tahun 2020 sebesar Rp (6.161.824.941,-) dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp (6.359.986.208,-) atau sebesar 103,22 %.

Bila dibandingkan dengan Suplus/Defisit Tahun 2019 sebesar Rp (7.011.561.385,-) Surplus / Defisit tahun 2020 turun sebesar Rp (651.575.177,-) atau sebesar 10.24 %.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun Anggaran tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator kinerja (output) dan tujuan telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Hal tersebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja selama 12 (dua belas) bulan selama tahun 2020.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana OPD.
5. Dalam menyusun anggaran akan mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, visi dan misi.
6. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.